BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, kepolisian resor kota Yogyakarta melakukan upaya yang meliputi upaya preventif dan represif. Penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh Penyidik di Reserse Kriminal Satuan Pidana Umum, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan melakukan tindakan terlebih dahulu Penyelidikan dan Penyidikan, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjerat pelaku tersebut dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
2. Faktor – faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian resor kota Yogyakarta dalam penanggulangan tindak perdangan orang, antara lain adalah kendala yuridis, lemah nya koordinasi antara aparat penegak hukum, dan masalah kultur budaya.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara TPPO disamping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk pengajuan restitusi, disarankan agar dibuat mekanisme petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari internal Kepolisian untuk digunakan sebagai pedoman bagi Penyidik di seluruh Indonesia dalam hal pemberian Restitusi bagi korban TPPO dan bagi institusi Kejaksaan juga diperlukan mekanisme/tatacara pengajuan Restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateriil agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum, solusi dari semua permasalahan ini adalah adanya Peraturan Pemerintah untuk implementasi UU PTPPO dengan juga harus dapat mengakomodir perdagangan anak yang belum diakomodir.
2. Agar koordinasi dan kerja sama antar penegak hukum lebih ditingkatkan lagi, karena sangat menentukan keberhasilan tugas, terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh korban TPPO, sehingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.